



**PENGARUH UPAH MINIMUM DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh :

WIWI OSTAFANI PUTRI
NIM. 2130402110

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025 M/ 1447 H**

ABSTRAK

Wiwi Ostafani Putri, NIM 2130402110, Judul Skripsi: “Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Barat”. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2025 M/1446 H.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk yang tinggi terhadap tingkat pengangguran, Sedangkan angka pengangguran juga meningkat dan upah yang ada tidak mengalami peningkatan sama sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dari tahun 2021- 2024 yang diambil dari situs Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan estimasi model regresi data panel, estimasi persamaan data panel dan uji hipotesis dan diolah dengan *eviews9*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan secara parsial pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengangguran dan secara simultan upah minimum dan pertumbuhan penduduk bersama sama tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur terimakasih penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan Rahmat, karunia, Kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Upah Mknimum Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat ” Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis susun dan selesaikan berkat do'a, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Tanpa do'a, bantuan dan dorongan tersebut skripsi ini tidak akan bisa terwujud. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis tersayang. Bidadari tak bersayap serta pintu surgaku yaitu Ibunda Yanti Syerli dan ayahnda Tersayang Oscar. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tiada pernah putus, materi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag M.A., M.Res. Ph.D Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini serta telah meluangkan waktu.
4. Fitri Yenti, SE.I.,MA selaku Ibuk Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa dan berjasa dalam penulisan skripsi ini dalam memberikan ide, saran, arahan, dan motivasi yang luar biasa, ditengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Nita Fitria, SE.I.,MA, CIFA selaku dosen Penguji I yang telah memberikan banyak saran serta arahan demi selesainya skripsi ini.
6. Gampito, SE.,M.Si selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu, berbagi ilmu serta memberikan kemudahan kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
8. Pihak Akama yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan.
10. Untuak keluargaku tercinta ibunda yanti syerli dan ayahnda oscar beserta adik”ku dan kakakku Muhammad alfajri ramadhan, iscar jonea, viocha armaisyah ananda dan kak viola ananda, Kak Gusdian Eka putri terimakasih atas bantuan moril maupun non moril yang telah membantu dan mendukung peneliti sampai di tahap akhir ini.
11. Teruntuk My bestie Salma Husni, Nadya Amanda dan Syifa nadatul ummi terimakasih segala dukungan, semangat, masukan, serta bantuan selama di bangku perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini.

12. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun skripsi ini, penulis tetap ingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit. Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba sebab “Skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritikan dan saran yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadikan amal ibadah di sisi Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi semua pihak terutama mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar., semangat, masukkan, serta bantuan selama di bangku perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini.

Wasaallamu’alaikum wr.wb.

Batusangkar, Agus 2025

Wiwi Ostafani Putri
2130402110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan penelitian.....	11
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	11
G. Defenisi Operasional.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Tingkat Pengangguran.....	14
2. Upah Minimum.....	22
3. Pertumbuhan Penduduk.....	29
4. Hubungan Upah Minimum Pertumbuhan penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran.....	35
B. Penelitian yang relevan.....	39
C. Kerangka Berfikir.....	41
D. Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis dan Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	44

D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.	53
2. Tingkat Pengangguran Sumatera Barat	55
3. Upah Minimum Sumatera Barat	56
4. Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat	56
B. Analisis Data Panel.....	57
1. Analisis Regresi Data Panel.....	57
2. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	60
3. Uji Asumsi Klasik	62
4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel	62
5. Pengujian Hipotesis	63
C. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode 2020-2024 (Persen)	4
Tabel 1. 2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Periode 2020- 2024 (Rupiah)	6
Tabel 1. 3 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 (persen).....	8
Tabel 3. 1 Rancangan Kegiatan Penelitian.....	43
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	54
Tabel 4. 2 Common Effect Model	58
Tabel 4. 3 Fixed Effect Model.....	59
Tabel 4. 4 Random Effect Model	59
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	60
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Langerange Multiplier	62
Tabel 4. 8 Random Effect Model	63
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial	65
Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	41
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Sumatera Barat	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara berkembang umumnya masih menghadapi berbagai masalah struktural dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, diantaranya kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dalam distribusi lapangan kerja. Permasalahan ini menjadi isu mendasar yang menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Sebagai mana dikemukakan (Naf'an, 2014) salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah mengurangi tingkat pengangguran yang terus menjadi persoalan kronis.

Pengangguran tidak hanya berdampak pada menurunnya produktivitas nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta instabilitas sosial. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia tergolong negara bermasalah dengan ketenagakerjaan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari tantangan ini. Sejak lama, persoalan ketenagakerjaan menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia, yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja secara proporsional, menyebabkan terjadinya kelebihan angkatan kerja yang sulit terserap pasar. Hal ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia produktif. (Michael P. Todaro, & Smith, S. C. 2011)

Tingkat Pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu Upah Minimum, kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrument kebijakan ketenagakerjaan yang digunakan oleh pemerintah untuk menjamin pendapatan minimum bagi para pekerja. Khususnya terhadap Tingkat Pengangguran. Tujuan utama dari penetapan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak dan meningkatkan kesejahteraan buruh, terutama bagi pekerja di sektor informal dan yang

memiliki daya tawar rendah. Namun, Kenaikan upah minimum yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja atau kondisi ekonomi yang memadai dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, salah satunya adalah peningkatan tingkat pengangguran, terutama di kalangan pekerja muda, tidak berpengalaman, dan sektor usaha kecil-menengah (UKM). (Mankiw. 2010)

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran juga disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk juga menjadi masalah yang signifikan yang mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar setiap tahunnya. Jika pertumbuhan kesempatan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah pencari kerja, maka pengangguran akan meningkat. Gita (2025) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tanpa diimbangi dengan ekspansi lapangan kerja yang memadai akan memperburuk pengangguran, terutama di daerah yang kapasitas industrinya terbatas seperti Sumatera Barat.

Berdasarkan Teori Keynes menyatakan pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, masalah pengangguran terjadi tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan mengakibatkan kerugian, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli Masyarakat, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli Masyarakat terhadap barang-barang. Yang pada akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja (Wulandari, R.2019)

Dalam Teori Malthus menyatakan Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economies*). Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja dengan sumber utama penawaran tenaga kerjanya adalah penduduk usia kerja. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini akan menekan tingkat upah. Sebaliknya secara

simetris tingkat upah akan naik apabila bila penduduk berkurang, sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Dengan asumsi sisi lain usaha untuk menaikkan tingkat upah dalam jangka panjang, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu mempunyai keluarga besar. Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan berkurang. (Priyono&ismail Zainuddin,2012)

Teori permintaan dan penawaran tenaga kerja (Neoklasik) menyatakan bahwa pasar tenaga kerja bekerja seperti pasar barang. Upah adalah harga tenaga kerja jika upah minimum ditetapkan di atas upah keseimbangan pasar, maka Permintaan tenaga kerja menurun karena perusahaan enggan membayar lebih mahal penawaran tenaga kerja meningkat lebih banyak orang ingin bekerja dengan upah lebih tinggi. Akibatnya terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, yang disebut sebagai pengangguran (Mankiw,2021)

Teori Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi, penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian, pertumbuhan penduduk dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan penduduk akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sukirno,2011)

Teori pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja (Todaro model) menyatakan dalam model Todaro-Harris, pertumbuhan penduduk memperbesar jumlah pencari kerja, terutama di wilayah urbanisasi. Urbanisasi cepat yang tidak disertai penciptaan lapangan kerja yang memadai akan meningkatkan pengangguran terbuka. (Todaro,M.P & Smith, S.C. 2009)

Teori yang menyatakan upah minimum dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu teori pengangguran struktural dan friksional Pertumbuhan penduduk mempercepat masuknya angkatan kerja baru, tetapi tidak selalu selaras dengan struktur pekerjaan yang tersedia,

sehingga menciptakan pengangguran struktural dan upah minimum yang tidak fleksibel juga bisa memperlambat proses penyesuaian pasar tenaga kerja, memperburuk pengangguran friksional dan struktural. Teori makro ekonomi, masalah pengangguran di bahas pada dasar tenaga kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah tenaga kerja. Upaya menurunkan tingkat pengangguran sangatlah penting. Terjadinya pengangguran akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. (Risen A. Sambaulu,2022)

Sumatera Barat salah satu provinsi yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan tingkat pengangguran. Di Sumatera Barat tingkat pengangguran terbuka masih ada pada tingkat yang mengkhawatirkan yang dipengaruhi banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang melonjak tinggi setiap tahunnya, ketidak sesuaian antara keterampilan, upah minimum yang belum sesuai (Hanifa, 2024).

Di bawah ini adalah kondisi pengangguran di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data BPS Periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Pengangguran Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	2.79	1.39	1.33	1.44
Kab. Pesisir Selatan	5.97	4.61	4.75	5.06
Kab. Solok	4.67	5.89	4.99	4.91
Kab. Sijunjung	3.57	4.87	4.71	4.73
Kab. Tanah Datar	4.63	5.91	5.35	5.3
Kab. Padang Pariaman	8.41	6.6	6.69	6.59
Kab. Agam	5.06	4.93	4.96	4.73
Kab. Lima Puluh Kota	2.25	3.72	3.95	3.68
Kab. Pasaman	4.92	5.38	5.09	5.25
Kab. Solok Selatan	4.84	3.71	2.57	2.3
Kab. Dharmasraya	5	6.23	6.22	6.02
Kab. Pasaman Barat	5.02	6.33	6.01	6.34

Kota Padang	13.37	11.69	10.86	9.88
Kota Solok	5.15	3.9	3.72	3.62
Kota Sawahlunto	6.38	5	4.98	5.55
Kota Padang Panjang	4.9	4.84	5.49	4.94
Kota Bukittinggi	6.09	4.9	4.99	4.72
Kota Payakumbuh	6.47	5.16	4.84	4.87
Kota Pariaman	6.09	5.19	5.68	5.32

Sumber: BPS Sumatera Barat 2020-2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menyatakan bahwa kondisi pengangguran dari tahun 2021-2024 di Provinsi Sumatera Barat dalam tahun terakhir mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari tahun 2021-2024 tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2021 mencapai angka 13.37% di kota Padang dari keseluruhan per Kabupaten/Kota yang ada. Sedangkan penurunan angka Tingkat Pengangguran rendah pada tahun 2023 sebesar 1.33% pada kabupaten kepulauan Mentawai dibandingkan tahun sebelumnya dari keseluruhan kabupaten/kota yang ada di sumatera barat. Dapat dilihat juga tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di sumatera barat mengalami peningkatan yang berbeda tiap daerahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat menyatakan karena tidak adanya peningkatan ataupun penurunan signifikan angka Tingkat pengangguran di Sumatera Barat disebabkan oleh berbagai permasalahan, yang ada seperti, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024, tingkat (TPT) di Sumatera Barat tercatat sebesar 5,75% yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, TPT berada di angka 5,94%. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tingkat pengangguran itu mengalami penurunan karena pemulihan ekonomi, setelah pandemi sektor ekonomi mulai pulih dengan peningkatan aktivitas diberbagai industri, terutama di pariwisata dan perdagangan. Meskipun ada penurunan angka ini masih menunjukkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Dan permasalahan lain yang mengalami tingkat pengangguran di Sumatera Barat seperti kondisi ekonomi kepala BPS Sumatera Barat menyatakan bahwa kondisi perekonomian yang tidak stabil dan kebijakan pemerintah yang belum

sepenuhnya terealisasi dapat mempengaruhi naik turunnya angka tingkat pengangguran di provinsi ini.

(<https://sumbar.antaraneews.com/berita/677897/bps-sebut-tidak-ada-lonjakan-angka-pengangguran-di-sumatera-barat>)

Tabel 1. 2
Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat
Periode 2020-2024 (Rupiah)

Kab/Kota	Upah Minimum			
	2021	2022	2023	2024
Kab Kepulauan Mentawai	Rp 2,297,050	Rp 1,987,340	Rp 1,950,304	Rp 2,429,633
Kab Pesisir Selatan	Rp 2,186,361	Rp 2,271,905	Rp 2,350,129	Rp 2,382,367
Kab Solok	Rp 2,226,681	Rp 3,339,847	Rp 2,505,907	Rp 2,314,010
Kab Sijunjung	Rp 2,322,406	Rp 2,520,604	Rp 2,274,144	Rp 2,558,029
Kab Tanah Datar	Rp 2,562,457	Rp 2,190,273	Rp 2,908,746	Rp 2,539,714
Kab Padang Pariaman	Rp 2,312,672	Rp 2,363,643	Rp 2,525,005	Rp 2,411,883
Kab Agam	Rp 2,481,624	Rp 2,447,970	Rp 2,853,820	Rp 2,627,037
Kab Lima Puluh Kota	Rp 2,050,824	Rp 2,028,035	Rp 2,302,328	Rp 2,343,721
Kab Pasaman	Rp 2,337,870	Rp 2,050,318	Rp 2,510,518	Rp 2,430,026
Kab Solok Selatan	Rp 2,440,003	Rp 2,234,342	Rp 2,754,343	Rp 3,052,717
Kab Dharmasraya	Rp 2,590,630	Rp 2,514,387	Rp 2,283,578	Rp 2,651,515
Kab Pasaman Barat	Rp 2,190,150	Rp 2,297,547	Rp 2,273,320	Rp 2,609,232
Kota Padang	Rp 3,195,631	Rp 3,251,587	Rp 3,305,897	Rp 3,226,305
Kota Solok	Rp 3,064,365	Rp 3,265,495	Rp 3,306,210	Rp 3,314,700
Kota Sawahlunto	Rp 2,599,095	Rp 2,523,053	Rp 3,239,384	Rp 2,741,492
Kota Padang Panjang	Rp 3,295,397	Rp 3,301,995	Rp 3,236,341	Rp 3,334,028

Kota Bukittinggi	Rp 2,634,218	Rp 2,831,386	Rp 2,998,614	Rp 3,260,014
Kota Payakumbuh	Rp 3,174,145	Rp 3,012,114	Rp 2,724,638	Rp 2,934,764
Kota Pariaman	Rp 2,444,632	Rp 2,214,211	Rp 2,862,190	Rp 3,087,313
Total	Rp 48,406,211	Rp 48,646,052	Rp 51,165,416	Rp 52,248,500

Sumber: BPS Sumatera Barat 2021-2024

Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat perkembangan upah minimum pada Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2022-2023 tidak mengalami peningkatan sama sekali. Pada tahun berikutnya terjadinya peningkatan namun relative kecil. Meskipun upah minimum mengalami peningkatan dan tingkat pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2024 namun tetap terjadi kenaikan Tingkat pengangguran pada tiap tahunnya.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan perusahaan di Tanah Air wajib mematuhi ketentuan masalah upah minimum yang terjadi di Sumatera Barat yang mana masih menjadi isu yang jelas dalam mempengaruhi kesejahteraan buruh dan pekerja. Permasalahan utama yang lebih mempengaruhi upah minimum seperti, Ketidak patuhan perusahaan terhadap UMP, meskipun upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Barat telah diterapkan, tetapi sejumlah perusahaan masih membayar upah di bawah standar tersebut. Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat mencatat bahwa banyak perusahaan, terutama skala menengah ke bawah tidak memenuhi kewajiban membayar upah sesuai UMP, hal ini menyebabkan buruh menerima upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena kenaikan tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada. Langkah ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan keberlanjutan dunia usaha di Ranah Minang.

(<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/652054/menaker-ingatkan-perusahaan-patuhi-ketentuan-kenaikan-ump-65-persen>)

Situasi di Sumatera Barat menggambarkan persoalan struktural yang kompleks, di mana dua variabel utama upah minimum dan pertumbuhan penduduk berpotensi berinteraksi dan memengaruhi tingkat pengangguran secara simultan. Selain itu, masalah ini diperburuk oleh kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih belum optimal, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, terutama di sektor industri dan jasa. (Triningsih, 2020)

Tabel 1. 3
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk			
	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Mentawai	1.17	1.15	1.56	1.53
Pesisir Selatan	1.38	1.36	1.49	1.48
Solok	0.93	0.92	1.28	1.27
Sijunjung	1.29	1.28	1.33	1.31
Tanah Datar	0.71	0.7	1.16	1.17
Padang Pariaman	0.74	0.73	1.73	1.73
Agam	1.28	1.26	1.54	1.49
Lima Puluh Kota	0.73	0.72	1.21	1.2
Pasaman	1.45	1.44	1.6	1.59
Solok Selatan	2.08	2.06	1.87	1.86
Dharmasraya	1.53	1.52	1.77	1.76
Pasaman Barat	1.44	1.42	1.53	1.5
Kota Padang	0.65	0.63	1.34	1.3
Kota Solok	1.88	1.86	2.14	2.12
Kota Sawah Lunto	1.13	1.11	1.45	1.44
Kota Padang Panjang	1.57	1.55	1.48	1.46
Kota Bukittinggi	0.62	0.6	0.9	0.87
Kota Payakumbuh	1.54	1.53	1.35	1.34
Kota Pariaman	1.52	1.5	1.14	1.15

Sumber BPS Sumatera Barat 2024

Dapat dilihat dari table 1.3 bahwa jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini juga bisa disebabkan oleh permasalahan urbanisasi dan migrasi. Malthus juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk bersifat geometrik, sementara pertumbuhan pangan bersifat aritmetik. Jika tidak dikendalikan, pertumbuhan penduduk akan melebihi kemampuan produksi pangan dan sumber daya. Dalam konteks ini, wilayah dengan laju pertumbuhan tinggi seperti Solok Selatan atau Kota Solok bisa menghadapi tekanan terhadap sumber daya, kecuali didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan infrastruktur. (Wulandari,2024)

Penurunan kondisi ekonomi ini akan mendorong orang untuk berhemat, jadi dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan tingkat jumlah penduduk, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo Dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Priyono & Ismail Zainuddin, 2012).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Sumatera Barat memperburuk masalah pengangguran karena tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, keterbatasan sektor industry, dan ketidak sesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.”

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti mengangkat masalah Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki beberapa kemungkinan masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan tingkat pengangguran dari Tahun 2020-2024
2. Meningkatnya upah minimum tidak disertai dengan pengurangan tingkat pengangguran
3. Meningkatnya Pertumbuhan penduduk berdampak terhadap tingkat pengangguran

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka membatasi masalah yang akan diteliti yaitu

1. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
2. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
3. Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti yaitu

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat ?

E. Tujuan penelitian

Maka berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dihasilkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ini adalah

- a. Manfaat penelitian bagi penulis

Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan bisnis islam pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca tentang pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Selain itu sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

2. Luaran Penelitian

Untuk diterbitkan di jurnal ilmiah dan bias menambah khazanah bagi perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan menjadi referensi bagi mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Menambah wawasan dan pengetahuan, memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya tentang pengaruh upah minimumda pertumbuhan penduduk

provinsi terhadap tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Barat.

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program strata 1 (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Definisi Operasional ini diperlukan agar nantinya konsep yang digunakan bisa diukur secara empiris serta bisa menghindari kesalahpahaman makna yang berbeda.

1. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman (Suhartini et al.,2020). Upah minimum yang dimaksud adalah data rupiah yang ada di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dari pada waktu sebelumnya. Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan dan bagi pembangunan. Oleh karena itu, besarnya jumlah penduduk jika tidak dimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti pengangguran dan ketidakstabilanya kondisi nasional secara keseluruhan. (Safuridar, 2017). Pertumbuhan penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persentase penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dibandingkan dengan jumlah total angkatan kerja di suatu wilayah. Tingkat pengangguran diukur berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera

Barat, yang dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. (BPS Sumbar, 2024)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tingkat Pengangguran

a. Pengertian Tingkat Pengangguran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penganggur adalah orang yang menganggur (yang tidak mempunyai pekerjaan). Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi dan merupakan yang paling erat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2010).

Thomas Carlyle berpendapat bahwa pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja, dan tidak mampu mendapatkan pekerjaan, barangkali merupakan sisi paling suram bahwa ketidaksamaan keberuntungan muncul dibawah sinar matahari (Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Tiga, 2013).

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam sesuatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun, dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumahtangga, dan pengangguran sukarela lain) jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja, dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja.

b. Teori-teori Tingkat Pengangguran

1) Teori Klasik

Teori Klasik menyatakan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Pengangguran terjadi karena mis- alokasi sumber daya yang bersifat sementara yang dapat diatasi dengan mekanisme harga. Terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan secara langsung biaya produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi dengan biaya produksi yang rendah. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya akan menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar. (Sadono Sukirno,2012)

2) Teori Keynes

Teori Keynes berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, masalah pengangguran terjadi tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan mengakibatkan kerugian, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Yang pada akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

c. Penyebab Terjadinya Tingkat pengangguran

Faktor yang menjadi penyebab pengangguran adalah sebagai berikut: (HM, Potret Ketenagakerjaan Pengangguran, Dan Kemiskinan Di Indonesia, 2015)

- 1) Apabila jumlah angkatan tenaga kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia.
- 2) Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang.

- 3) Tidak seimbangnya kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu terjadi. Alasannya belum tentu ada kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
- 4) Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan Kerja wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia.
- 5) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu Negara lainnya.

d. Dampak dari Tingkat Pengangguran

- 1) Terhadap kegiatan ekonomi

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak akan memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan ialah sebagai berikut:

- a) Pengangguran akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa memaksimalkan yang akan dicapainya, karena pendapatan nasional *Riil* (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dari pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Hal ini akan berlanjut pada tingkat kemakmuran masyarakat akan lebih rendah.
- b) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Ketika kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah ikut menurun. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan akan terganggu.

c) Pengangguran tidak menunjang pertumbuhan ekonomi. Dilihar dari dua akibat buruk yang terjadi pada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengurangan tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan.

Kedua, Keuntungan perusahaan rendah menyebabkan mengurangi keinginan investor untuk berinvestasi.

2) Terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

- a) Pengangguran mengakibatkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
- b) Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
- c) Pengangguran menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lemah dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

Faktor penting dalam menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh terwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatam masyarakat dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Untuk individu itu sendiri, pengangguran akan membuat mereka mengurangi dan membatasi pengeluaran kosumsinya karena ketiadaan pendapatan. Disamping itu juga dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk atas diri sendiri dan keluarganya.

Apabila pengangguran disuatu Negara dalam keadaan buruk, kekacauan politik dan sosial akan berlaku dan mengakibatkan efek yang buruk pula kepada kesejahteraan masyarakat dan propek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Maka terbukti bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat dan oleh sebab itu secara terus menerus dilakukan usaha-usaha untuk mengatasinya (Sukirno, Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dan Klasik Hingga Keynesian Baru, 2012).

e. Solusi Mengatasi Tingkat Pengangguran

Dalam mengatasi pengangguran, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu menurunkan angka pengangguran diantaranya: (HM, Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan Indonesia: Masalah Dan Solusi, 2015)

- 1) Dalam pembangunan nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diarahkan pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Guna menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat dengan kebijakan fiskal dan pemberdayaan UKM meliputi: Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil.
- 2) Sinergisitas kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuann yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

f. Faktor Penentu Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Berikut adalah penjelasan beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat pengangguran:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Penurunan pertumbuhan ekonomi biasanya menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK karyawan. Dan Ekspansi ekonomi akan mendorong penciptaan lapangan kerja, sehingga menurunkan pengangguran.

2) Kemajuan Teknologi

Otomatisasi dan digitalisasi bisa menggantikan tenaga manusia, terutama di sektor manufaktur dan administrasi. Namun, teknologi juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di bidang IT, teknologi informasi, dan jasa lainnya.

3) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan fiskal dan moneter seperti subsidi, pajak, insentif investasi, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dan Program pelatihan dan pendidikan vokasional juga membantu mengurangi pengangguran struktural.

4) Pendidikan dan Keterampilan

Kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar menyebabkan pengangguran struktural. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan, biasanya semakin mudah seseorang mendapatkan pekerjaan.

5) Upah Minimum

Jika upah minimum terlalu tinggi, perusahaan bisa enggan merekrut pekerja baru, terutama di sektor informal atau UMKM. Namun, upah yang terlalu rendah juga bisa memicu pengangguran terselubung, karena orang bekerja di bawah kapasitasnya.

6) Globalisasi dan Persaingan Internasional

Perusahaan lokal yang tidak mampu bersaing bisa tutup, menyebabkan PHK. Di sisi lain, investasi asing yang masuk bisa membuka banyak lapangan kerja.

7) Demografi dan Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan jumlah angkatan kerja (misalnya lulusan baru) jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja bisa meningkatkan pengangguran. Struktur usia penduduk juga berpengaruh—negara dengan penduduk muda yang besar butuh lebih banyak lapangan kerja.(Sadono Sukino,2012)

g. Masalah Tingkat Pengangguran

Masalah yang terjadi pada Tingkat pengangguran mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial dan politik. Beberapa masalah utama yang berkaitan dengan Tingkat pengangguran ialah:

1) Penurunan Pendapatan dan Daya Beli

Pengangguran menyebabkan individu kehilangan sumber pendapatan utama. Dan daya beli masyarakat menurun, yang berdampak pada permintaan barang dan jasa.

2) Kemiskinan

Tingkat pengangguran yang tinggi memperburuk tingkat kemiskinan karena banyak orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

3) Ketimpangan Sosial

Meningkatnya pengangguran memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang bekerja dan yang tidak.

4) Tingginya Beban Pemerintah

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk bantuan sosial, subsidi, dan program pelatihan kerja. Dan juga pendapatan negara dari pajak menurun karena lebih sedikit orang yang bekerja.

5) Penurunan Produktivitas Nasional

Tenaga kerja yang tidak digunakan secara optimal menyebabkan potensi produktivitas nasional menurun. Dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

6) Kurangnya Inovasi dan Daya Saing

Pengangguran dapat mengurangi motivasi untuk mengembangkan keterampilan baru. Juga membuat perusahaan kekurangan tenaga kerja potensial untuk pengembangan produk dan inovasi. (Ahmad Fauzi,2020)

h. Kebijakan Tingkat Pengangguran

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran Pemerintah senantiasa berupaya mengatasi pengangguran melalui berbagai kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan selama periode 2019-2023 dengan berbagai cara.

1) Peningkatan Kualitas SDM dan Keterampilan Tenaga Kerja

Melalui pendidikan vokasi maupun pelatihan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan industri, menjadi relevan dengan dunia kerja, dan memberikan insentif bagi peserta. Pengembangan kewirausahaan juga diberikan akses permodalan yang mudah untuk UMKM dengan membangun ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Salah satu kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja adalah program kartu prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

2) Menciptakan iklim berinvestasi yang mudah

Memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang ingin menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang dominan kepada kawasan industri dan pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif. Program padat karya juga sangat efektif agar dapat menyerap tenaga kerja informal. Kerja sama dengan swasta juga dapat menguntungkan para pihak apalagi pihak

yang membutuhkan pekerjaan.

3) Penyesuaian Pasar Tenaga Kerja

Adanya reformulasi regulasi dengan bentuk penyederhanaan untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja bahkan meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Informasi pasar tenaga kerja juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta mobilitas tenaga kerja antar daerah peluang kerjanya dapat lebih besar.

4) Studi Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Inflasi Dan Tingkat Pengangguran

Program Jaring Pengaman Sosial Program bantuan sosial (bansos) juga sangat efektif dilaksanakan sebagai bentuk bantuan kepada yang terdampak pada krisis. Asuransi pengangguran diberikan bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat terjamin keamanan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

5) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan instrumen permodalan ringan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat. (Manullang, 2024)

2. Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Upah kerja atau yang biasa di kenal dengan istilah gaji di Indonesia adalah balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu, sedangkan upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Dalam teori ekonomi, upah secara umum merupakan harga yang dibayarkan kepada

pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti factor produksi lainnya atau tenaga kerja yang diberikan imbalan atas jasanya. (Rizal, 2018) Upah sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil kerja tertentu, tidak secara periodik. Selain upah ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menunjuk makna yang sama, yaitu kompensasi dan imbalan. Secara umum, para ahli ekonomi mempersamakan ketiga istilah tersebut. (Suhartini, 2020)

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk: pertama pemberian uang, seperti gaji, tunjangan dan insentif, kedua pemberian material dan fasilitas dan ketiga pemberian kesempatan berkarir. Gaji adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau pekerja secara periodik, sedangkan upah adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil kerja tertentu tidak secara periodic. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, karena karyawan tersebut dianggap telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu, karena keberhasilan atau prestasinya (Sutrisno, 2011). Jadi dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diterim oleh pekerja atas jasa yang telah diberikan berdasarkan kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Upah Minimum

Berdasarkan ketentuan pasal I ayat 1 UU No.78 Tahun 2015, upah merupakan hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian, kesepakatan, peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya atas suatu pekerjaan

yang telah dilakukan.

Ketentuan upah minimum diatur dalam pasal 41-50 UU No.78 Tahun 2015. Pasal 41 ayat 1-2 menyebutkan bahwa :

- 1) Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai jarring pengaman
- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 di tetapkan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen dan pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana di maksud ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.

c. Teori Upah Minimum

1) Teori Malthus

Teori ini meninjau upah erat kaitannya dengan perubahan penduduk. pertumbuhan penduduk merupakan faktor strategis yang dipakai untuk menjelaskan berbagai hal. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran. Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja, juga ditentukan oleh penawaran tenaga kerja. Dan sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang sudah pasti berasal dari penduduk (Arfida, 2007) Bila penduduk bertambah maka penawaran tenaga kerja juga bertambah. Hal tersebut akan menekan tingkat upah. Sebaliknya tingkat upah akan meningkat bila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Dilihat dari sisi lain usaha menaikkan tingkat upah tidak memberi pengaruh dalam jangka panjang karena bila upah lebih

tinggi dari semula, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu untuk mempunyai keluarga besar.

Ketika tingkat upah menurun maka kemampuan ekonomis akan berkurang. Penurunan ini akan mendorong orang untuk berhemat. Orang akan berpikir ulang untuk mempunyai keluarga besar dan memilih membatasi jumlah anak, hal tersebut akan mengurangi jumlah penduduk dan tingkat upah akan menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula. (Priyono, 2012)

2) Teori Jhon Stuart Mill

Jhon Stuart Mill berpendapat bahwa tingkat upah juga tidak akan beranjak dari tingkat semula, namun dengan alasan yang berbeda. Menurutnya, dalam dunia usaha pengusaha telah menyediakan bagian tertentu dari dananya yang diperuntukkan pembayaran upah pada saat investasi dilaksanakan. Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut. Dari dua tokoh klasik ini dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. Tingkat yang rendah tersebut, yaitu tingkat yang dapat mempertahankan kehidupan. Mempertahankan mempunyai implikasi yang mengacu pada apa yang ada atau yang lalu. Bila yang lalu rendah, maka yang akan datang rendah. (Mulyaningsih, Pembangunan Ekonomi, 2019)

3) Teori Kelompok Neoklasik

Teori ini sependapat dengan 2 teori sebelumnya tentang upah hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. Namun sedikit pembaruan terhadap sikap yang *pesimisme* harus dirubah karena tingkat upah bisa saja tinggi asal sesuai dengan produk marginalnya. Walaupun dalam teori ini tingkat upah cenderung untuk sama dengan nilai pasar dari produk marginal. Tingkat upah juga tidak

sama untuk semua tenaga kerja. Karena setiap tenaga kerja memiliki kualitas yang berbeda dalam pencapaian produktifitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang mereka miliki. Makin banyak modal yang masuk, makin tinggi kualitasnya, modal yang dimaksud terdiri atas pendidikan latihan, pengalaman kerja dan kesehatan mereka. Jalan pikiran teori neoklasik ini masih mendominasi jalan pikiran sekarang.

d. Faktor Penentu Upah Minimum

Banyak faktor yang sering mempengaruhi penentuan tingkat upah minimum, diantaranya ialah :

1) Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

KHL merupakan komponen utama dalam penentuan upah minimum. KHL dihitung berdasarkan kebutuhan konsumsi pekerja lajang untuk hidup layak dalam sebulan

2) Produktivitas Pekerja

Produktivitas mencerminkan output per kerja jika produktivitas meningkat, maka ada ruang untuk menaikkan upah karena perusahaan memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

3) Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Inflasi mempengaruhi daya beli pekerja, sementara pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan dunia usaha dalam menanggung kenaikan upah

4) Kondisi Pasar Tenaga Kerja (*Supply dan Demand*)

Jika jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan yang tersedia, kekuatan tawar pekerja menurun, sehingga mempengaruhi upah yang ditetapkan

5) Kemampuan Dunia Usaha

Kelayakan kenaikan upah minimum juga mempertimbangkan kemampuan sector usaha dalam membayar upah baru tanpa mengorbankan kelangsungan bisnis

6) Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui regulasi menetapkan formula dan batasan untuk menetapkan upah minimum, yang dapat disesuaikan berdasarkan wilayah atau jenis usaha. (Suharnanik,2023).

e. Masalah Upah Minimum

1) Tindak Lanjut Pemerintah yang kurang Tegas

Meskipun ada regulasi yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar UMP, implementasinya masih lemah. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, belum ada laporan penagduan dari kerja terkait pelanggaran pembayaran upah minimum, hal ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih kurang efektif

2) Upah di Bawah UMP beberapa Daerah

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, salah satu daerah termiskin di Sumatera Barat, upah rata-rata pekerja hanya sekitar Rp 1.950.304 per bulan, jauh di bawah UMP yang ditetapkan sebesar Rp 2.994.193 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan ketimpangan antara standar upah yang ditetapkan dan kenyataan di lapangan.

3) Penerapan Struktur dan Skala Upah yang Tidak Merata

Meskipun ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sesuai peraturan perundang-undangan, kenyataanya banyak perusahaan yang belum melaksanakan hal ini dengan baik. Akibatnya, terdapat ketidakpastian dalam penentuan besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. (sumbar.antarnews.com)

f. Kebijakan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di banyak negara tidak terlepas dari kebijakan ILO (*International Labour Organization*) yaitu kebijakan serangkaian standar dan pedoman internasional yang bertujuan unruk menciptakan pekerjaan yang layak dan meningkatkan hak-hak pekerja.

Konvensi ini muncul karena mekanisme perundingan dan mekanisme penentuan upah lainnya tidak berjalan seluas dan secepat yang diharapkan.

Penetapan upah minimum dipandang sebagai instrumen kebijakan yang sesuai untuk mencapai keadilan dalam hubungan kerja, dan memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengurangi persaingan tidak sehat antara buruh dalam pasar kerja disebabkan karena tidak sempurnanya pasar kerja. Kedua, melindungi daya beli buruh yang berpenghasilan rendah karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya daya beli buruh. Ketiga, mengurangi kemiskinan, karena adanya kenaikan upah minimum setahap demi setahap kaum buruh yang miskin akan berkurang. Keempat, meningkatkan produktivitas kerja, karena dengan adanya upah minimum maka pengusaha yang membayar upah rendah akan didorong menaikkan upah buruhnya. Hal ini mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan agar mampu membayar upah minimum. Kelima, lebih menjamin upah yang sama bagi pekerjaan yang sama, dengan adanya upah minimum maka perbedaan upah antara perusahaan yang satu dengan yang lain untuk pekerjaan yang sama akan berkurang karena perusahaan yang membayar rendah terpaksa meningkatkan upah buruhnya. Keenam, mencegah terjadinya perselisihan, dengan penetapan upah minimum akan mempengaruhi perubahan struktur/tingkat upah di perusahaan, karena itu perselisihan mengenai upah yang biasa terjadi dapat dihindari, karena meningkatkan daya beli masyarakat pada akhirnya. Ketujuh, mencegah menurunnya upah, karena tidak seimbang pasar kerja, disebabkan penawaran yang melebihi dari permintaan tenaga buruh.

Di Indonesia, penerapan upah minimum diterapkan sejak tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1990-an, kebijakan upah minimum di Indonesia terus meningkat setelah mendapat tekanan dari internasional. Pada periode tahun 1989 hingga tahun 2000 upah minimum di

Indonesia meningkat lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sehingga upah minimum menjadi tingkah upah yang berlaku oleh sebagian besar pekerja, terutama di perusahaan skala menengah dan kecil. Semua pekerja tidak terampil dan setengah terampil di perusahaan ini menerima upah yang kurang lebih sama besarnya yaitu upah minimum. Bahkan upah minimum tampaknya juga telah mengurangi insentif bagi pekerja untuk meningkatkan produktifitas. (Izzaty&Rafika Sari, 2022)

3. Pertumbuhan Penduduk

a. Pengertian Penduduk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penduduk merupakan orang-orang yang mendiami suatu tempat (desa, kota dan sebagainya). Penduduk adalah warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/ berniat menetap selama minimal 1 tahun. Pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor pendukung pembangunan sebab dengan penambahan penduduk berarti juga penambahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar (Suwito,2020).Dalam konteks pembangunan jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi daerah dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan atau sebagai pemacu pembangunan tetapi sekaligus juga penghambat pembangunan (Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, 2014). Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi.

Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan.

Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian *intern* yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah pula untuk mendapatkan modal *eksternal* dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda (Iqbal, 2017)

b. Laju pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen (Mulyadi, 2014). Kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa mendatang. Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut: (Rumbia, 2008)

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

c. Teori Pertumbuhan penduduk

1) Neo Malthusian (Gerreth Hardin & Paul Ehrlich)

Dalam teori ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara "*Preventif Check*" yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Disamping itu pula disebutkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah

upaya terencana dalam mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk (Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro, 2011).

Dalam meminimalisir pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan tahapan yang sudah direncanakan sedemikian baiknya agar pada saat pelaksanaannya berjalan dengan baik, karena setiap saat pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya itulah yang disebut pertumbuhan penduduk.

2) Malthusian

Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa penduduk (seperti tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, maka akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa untuk hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Inilah sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia.

3) Hirschman (Otto-Albert Hirschmann)

Menurut Hirschman, “Tekanan penduduk pada standar kehidupan melahirkan tekanan yang baik, melahirkan kegiatan yang dirancang untuk mempertahankan lingkungan dan untuk mengorganisasikan dirinya sendiri agar semakin baik”. Penduduk dan standar kehidupan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi dikarenakan hal ini berkaitan dengan pendapatan perkapita, serta indeks pembangunan manusia yang nantinya akan menentukan standar hidup seseorang (Hutasoit, 2017))

d. Faktor Penentu Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Adapun komponen pertumbuhan penduduk yaitu:

1) Tingkat Kelahiran (*fertilitas*)

Fertilitas merupakan tingginya angka laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara berkembang, di Indonesia tingkat kelahiran dapat menghambat proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan. Sebagai negara berkembang, Indonesia diuntungkan dengan ditemukannya berbagai teknologi dan alat kontrasepsi oleh negara-negara barat melalui industrialisasi dan modernisasi untuk diadopsi menjadi program Keluarga Berencana (KB) sehingga dapat menurunkan angka kelahiran (*fertilitas*) relatif lebih cepat dibandingkan negara-negara Eropa pada umumnya. Tinggi rendahnya tingkat *fertilitas* dapat menggambarkan kecepatan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara (Hutasoit, 2017).

2) Tingkat Kematian (*mortalitas*)

Tingkat *mortalitas* merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat memengaruhi perubahan penduduk. Penurunan angka kematian (*mortalitas*) yang lebih cepat tanpa proses pembangunan dalam bidang ekonomi yang ditunjukkan dengan semakin majunya industrialisasi laju pertumbuhan ekonomi, sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan dan tenaga medis juga tenaga penyuluhan keluarga berencana seperti yang terjadi di negara Eropa yang mengalami proses panjang ditandai dengan adanya transisi vital.

3) *Migrasi* (Perpindahan penduduk)

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu daerah ke daerah lain yang melampaui batas-batas administrasi, politik negara, yang diartikan sebagai

perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. (Lucky Radita Alma, S.KM.,M.P. dan CENDEKIA Jaya,P.J., & Harjanto,T, 2019)

e. Masalah Pertumbuhan Penduduk

Masalah pada pertumbuhan penduduk memiliki beberapa aspek penting yang memberikan dampak pada pembangunan sosial dan ekonomi yang mencakup pada laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk yang tidak merata, ketimpangan distribusi penduduk, dan tantangan demografis. Distribusi penduduk yang tidak merata menyebabkan konsentrasi penduduk mengalami ketimpangan antar wilayahnya sehingga pertumbuhan penduduk yang tinggi memberikan dampak pada meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan. (Mulyaningsih, 2019)

f. Kebijakan Pertumbuhan Penduduk

Kebijakan Kependudukan dibedakan ke dalam dua tujuan. Pertama, kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kedua, kebijakan yang bertujuan pada perbaikan tingkat sosial dan ekonomi, seperti pengaturan migrasi, kebijakan pelayanan terhadap penduduk usia lanjut, serta kebijakan-kebijakan berkualitas yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi. Kebijakan kependudukan yang berorientasi secara umum sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan kependudukan yang pronatalis dan kebijakan kependudukan yang antinatalis. Kebijakan kependudukan yang banyak dianut saat ini adalah yang antinatalis. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kelahiran. Negara-negara yang menjalankan program KB termasuk ke dalam kelompok negara yang antinatalis. Dibenua Asia.

Salah satu kebijakan dalam bidang kependudukan yang sangat penting di Indonesia dan telah menunjukkan keberhasilannya adalah kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui program KB. Ide dasar tentang pembangunan keluarga sejahtera merupakan landasan

filosofis pemerintah dalam merumuskan kebijakan kependudukan. Penerjemahan ide dasar ini secara konkret terutama pada masa- masa awal gerakan kependudukan lebih perkotaan tapi di pedesaan pun kebutuhan KB mulai terasa penting bagi keluarga. Meskipun program KB di Indonesia cukup diakui keberhasilannya di kalangan internasional, banyak kritik yang diajukan terhadap keberhasilan Indonesia ini. Kritikan tersebut antara lain adalah menyangkut pelaksanaan KB karena kebijakan ini mendapat kritikan luas terutama karena menyangkut masalah hak asasi manusia. Angka laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini sangat cepat. Dimana angka kelahiran total sebesar 2,6 persen, dan angka ini tergolong tinggi dilihat dari rata-rata wanita berusia subur. Karena itu diperlukannya lagi strategi baru untuk terciptanya keluarga kecil sejahtera salah satunya dengan mengadakan seminar dan sosialisasi program KB. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. sedangkan Elibu Bergman mendefinisikan kebijakan penduduk sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana didalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Secara umum kebijakan penduduk harus ditujukan untuk:

- 1) Melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri terutama generasi yang akan datang.
- 2) Memberikan kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar, guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga dan anaknya.
- 3) Kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang.(Ghozali&Aji, 2024)

4. Hubungan Upah Minimum Pertumbuhan penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran

a. Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran

Upah minimum memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap pengangguran. Pengaruh positifnya yaitu dimana kenaikan tingkat upah minimum akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk tersebut akan mendapatkan respon negatif dari konsumen sehingga konsumen mengurangi pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja yang pada akhirnya pengangguran meningkat.

Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu dilihat dari jumlah penawaran tenaga kerja, karena kenaikan tingkat upah minimum akan menyebabkan penawaran kerja meningkat sehingga tingkat pengangguran berkurang. Tingkat upah minimum dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Efek yang paling terasa dari kebijakan penetapan upah minimum adalah tingkat upah minimum yang semakin tinggi yang dikarenakan perusahaan harus menanti kebijakan pemerintah sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja.

Semakin tinggi upah minimum maka akan mengurangi tenaga kerja dan akan meningkatkan tingkat pengangguran karena besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan sebaliknya ketika upah minimum rendah perusahaan akan menarik banyak tenaga kerja

b. Hubungan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran

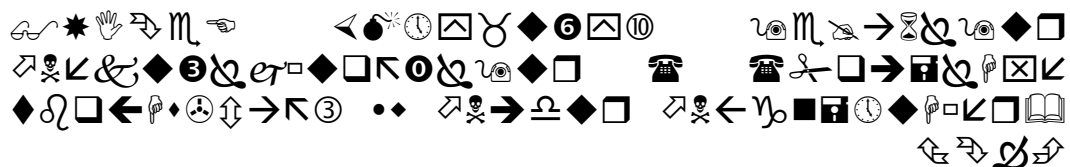
Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan di beberapa sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah, semakin maraknya pertumbuhan penduduk disuatu wilayah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menanggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta

tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya. (Subandi,2011)

c. Hubungan upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran

Hubungan antara upah minimum, pertumbuhan penduduk dan pengangguran sangatlah kompleks. Ketika upah minimum naik akan menyebabkan meningkatnya biaya dalam perusahaan, sehingga akan menimbulkan pengangguran selain itu dapat mendorong penyerapan tenaga kerja jika pertumbuhan ekonominya baik. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan persaingan pasar dan jika tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sepadan itu dapat menyebabkan pengangguran. (Ghozali,2024)

Sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan upah terhadap pekerjaan dari masing-masing manusia, Allah SWT berfirman dalam surat (Al-Ahqaf 46:19)

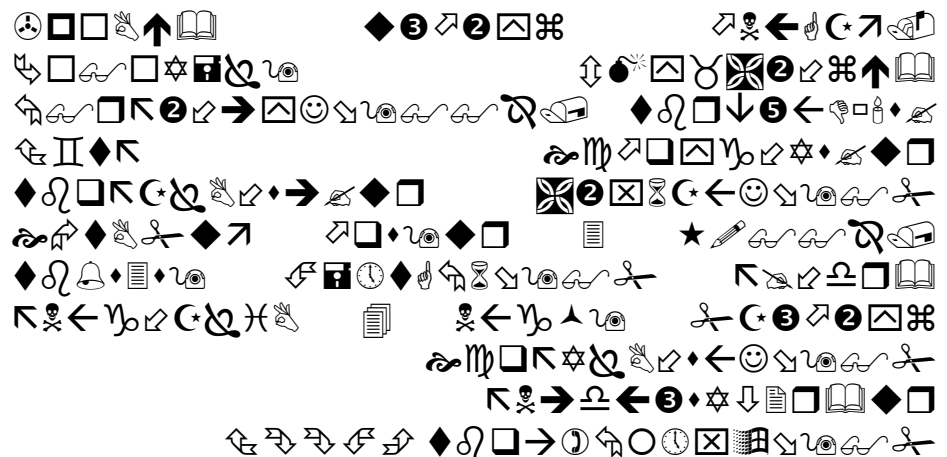


Artinya : dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Upah dalam islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika majikan berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kezaliman yang dilarang. Prosedur pembayaran upah boleh dibayar secara tunai atau tidak tunai (dalam bentuk cek dan sebagainya). Apabila disepakati upah tersebut diberikan sesuai dengan tempo masa tertentu (hari/ minggu/ bulan) maka harus sesuai dengan kesepakatan telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Populasi yang besar merupakan modal utama untuk

meningkatkan ekonomi. Selain itu, populasi yang besar juga merupakan modal utama dalam membangun militer dan politik. Permasalahan kemunduran dan ekonomi yang lemah, bukan karena besarnya jumlah penduduk melainkan karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Secara teoritis dan fakta sejarah membuktikannya, Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang maju dan berkualitas. Pada generasi awal umat Islam, seorang muslim memiliki kualitas kepribadian dan keilmuan, sehingga mereka menguasai aspek-aspek kehidupan yang berlangsung selama 700 tahun. Bahkan Rasulullah SAW menyebut dirinya dan umatnya ketika itu sebagai sebaik-baik generasi. Untuk itu, pertumbuhan populasi selaras dengan pertumbuhan generasi yang berkualitas, sebagaimana digambarkan Allah dalam Al-Qur'an (QS Al-Imran:110) :



Artinya : kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

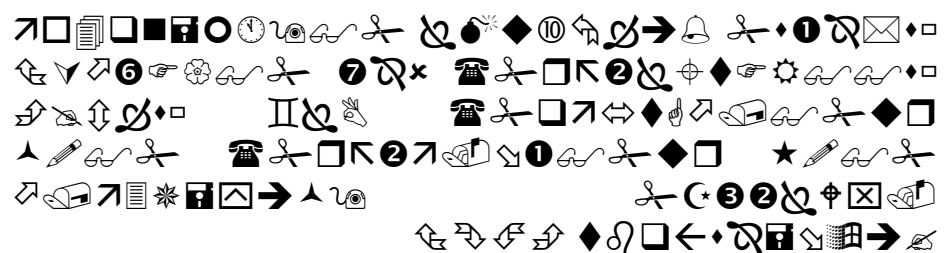
Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat umat Islam adalah umat terbaik yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi sisi kebaikan dari umat ini adalah sisi kemanfaat kepada manusia. Sifat yang mendasar adalah mendorong kebaikan, baik bersifat ibadah maupun social dan menghindari kerusakan atau mencegah orang melakukan kerusakan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “sebaik-baik manusia yang

paling memberi manfaat kepada manusia lain”

d. Pengangguran Dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Islam, bekerja yang baik diyakini dapat membangun diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara dan merupakan pemerintah agama. Seseorang yang tidak mau menggunakan potensi yang ada pada dirinya itulah yang dikatakan pengangguran yang membahayakan diri sendiri dan juga masyarakat, karena yang demikian adalah mengangguran yang memikul dosa (Naf'an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, 2014).

Allah SWT telah menyediakan kekayaan alam segala yang ada dilangit dan dibumi, maka sebagai makhluknya manusia dianjurkan untuk mengolahnya sebagai rasa syukur dan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dengan begitu dia akan mampu memenuhi kebutuhannya dan mampu memakmurkan bumi. Setiap muslim dianjurkan untuk bekerja, sehingga kebutuhan hidupnya dan keluarganya dapat terpenuhi. Kerja sebagai unsur produksi didasari istikhlaf, sebagaimana manusia di beri tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta yang diamanahkan Allah untuk mencukupi kebutuhannya (Sodiq, 2015). Dalam firman Allah SWT (QS Al-Jumuah:10) :



Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT secara khusus memerintahkan hambanya untuk bekerja dimuka bumi dalam rangka mencari rezeki. Manusia bekerja keras dan dilarang untuk bermalas-malasan.

Ada dua hal penyebab pengangguran menurut ekonomi islam Pertama faktor individu terdiri dari kemalasan, cacat/udzur dan rendahnya pendidikan dan keterampilan . *kedua* faktor sosial dan ekonomi. Kedua faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia dikarenakan, ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-real, banyaknya tenaga kerja wanita (Naf'an, Ekonomi makro Tinjauan Ekonomi Syariah, 2014).

B. Penelitian yang relevan

1. Pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di kota makasar (Syahrina Syam Hs (2013). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, secara parsial menunjukkan upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan data *thime series* dari tahun 2001-2011 (11 tahun) yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode analisis regresi linier berganda. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis terletak pada salah satu variabel yang membahas pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran, perbedaannya penelitian ini juga membahas pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran dan perbedaan lainnya yaitu penelitian ini menggunakan data *thime series* 11 tahun sedangkan penulis mengolah data panel 5 tahun di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam prespektif ekonomi islam (studi kasus di provinsi lampun) (Adelia Saputri (2019). Hasil penelitiannya Menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kab/Kota Lampung, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kab/Kota Lampung. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Populasi dan sampel penelitian ini adalah jumlah seluruh laporan data pengangguran dan data jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi serta upah minimum di provinsi Lampung dengan sampel 5 (lima) tahun terakhir. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada satu variabel yaitu pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran, perbedaannya penelitian ini juga membahas jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka.

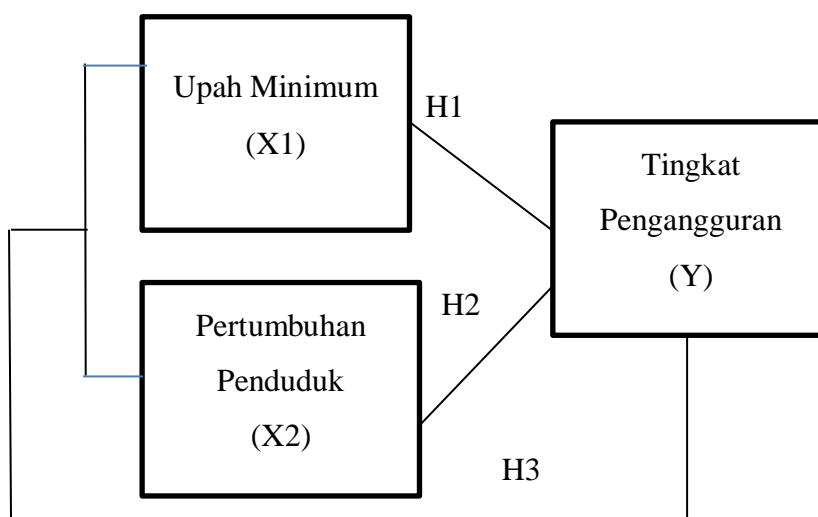
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat (Windy Alifah Sahara dan Nelvia Iryani). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, dan upah minimum provinsi sebesar 52.7%. Secara parsial, hanya variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series selama periode 2010-2021, yang mencakup data tentang tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, dan upah minimum provinsi. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sumatera Barat Dalam Angka. Uji asumsi klasik seperti uji linieritas, normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan

multikolonieritas juga dilakukan untuk memastikan validitas model yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu salah satu variabel pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran, perbedaannya penelitian ini juga membahas pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka dan perbedaan lainnya yaitu penelitian menggunakan metode *ordinary least square* (OLS), dan mengolah data dengan menggunakan data *thime series* 11 tahun sedangkan penulis mengolah data panel 5 tahun di Provinsi Sumatera Barat.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan landasan teori dari penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2. 1
Kerangka Teori



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kandungannya dalam penelitian (Arikunto, 1996). Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Martono, 2014).

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka didapat hipotesis bahwa:

1. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran

H_0 : Upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

H_0 : Upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

2. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran

H_0 : Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

H_2 : Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

3. Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat

H_0 : Upah minimum dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

H_3 : Upah minimum dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (Subagyo, 2011).

Adapun variable Independent dalam penelitian ini adalah upah minimum (X_1), pertumbuhan penduduk (X_2), tingkat pengangguran (Y).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan data yang digunakan adalah data secara keseluruhan upah minimum, pertumbuhan penduduk, dan Tingkat pengangguran dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik. Waktu penelitian direncanakan bulan Januari 2025 sampai Juli 2025.

**Tabel 3. 1
Rancangan Kegiatan Penelitian**

Uraian Kegiatan	Tahun 2025						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Penyusunan Proposal							
Pembuatan Proposal							
Bimbingan Proposal							
Seminar Proposal							
Bimbingan Setelah Seminar							
Penelitian							
Bimbingan Skripsi							
Munaqasah							

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder ini tidak diberikan secara langsung, akan tetapi diakses melalui perantara seperti dokumen/website. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan melibatkan waktu dan tempat, data diambil dari upah minimum, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran dari tahun 2020-2024

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik atau metode yang dilakukan dengan cara melihat, mencari, membaca dan mempelajari serta menganalisis dokumen (data) yang telah ada yaitu dengan menggunakan data panel dari Badan Pusat Statistik.

Pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, dan merupakan sebuah proses mencari berbagai *literature*, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data dalam penelitian ini didapat dari data yang telah dikumpulkan dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi *linear berganda* dengan menggunakan data panel. Penelitian ini menggunakan bantuan Eviews 9 data panel adalah gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* adalah data yang diambil dari berbagai unit. Sedangkan data *time series* adalah data yang diambil dari suatu

periode tertentu (Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto , 2016).

Dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing *koefisien regresi* variabel *independen* terhadap variabel *dependen* maka digunakan uji statistik diantaranya

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model *regresi*. Dalam hal ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah :^(Noor 2011)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah distribusi nilai residual normal. Karena model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, uji normalitas dilakukan pada nilai residu, bukan variabelnya sendiri. Uji *Kolmogorov Smirnov*, *histogram*, *plot normal P*, *skewness*, dan *kurtosis* adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk menguji normalitas. Tidak ada metode yang tidak tepat atau buruk. Rekomendasinya adalah bahwa pengujian menggunakan metode grafik sering menyebabkan perbedaan pandangan antara pengamat. Uji *Kolmogorov-Smirnov* juga dapat digunakan untuk mendeteksi normalitas data oleh Ghozali. Nilai residual yang dihasilkan harus dibandingkan dengan nilai signifikansi yang ditetapkan.

Kriteria pengambilan keputusan data berdistribusi normal adalah memenuhi syarat:

- 1) Jika $\text{Sig} > 0.05$ maka berdistribusi normal (H_0)
- 2) Jika $\text{Sig} < 0.05$ maka data tidak berdistribusi normal (H_a)

b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Jika ada, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya terganggu. Selain itu, tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menghindari kebiasaan dalam mengambil kesimpulan mengenai pengaruh uji parsial masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Toleransi dengan batas minimal sebesar 0,10 atau *Variance Inflation Factor* (VIF) maksimal 10 adalah nilai *cut off* yang biasa digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah ketika residual untuk pengamatan satu dengan yang lain berkorelasi menurut runtut waktu. Tidak ada masalah autokorelasi, menurut model regresi yang baik. Dalam suatu model, pengujian autokorelasi dilakukan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_i) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (e_{t-1}). Pengujian ini dilakukan pada sampel data seri waktu, di mana n adalah periode waktu. Uji *Durbin-Watson* dan *Run Test* adalah dua contoh uji statistik yang sering digunakan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam model regresi yang mempengaruhi persyaratan, kesamaan varians antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, yang dikenal sebagai homoskedastisitas, dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residualnya) dapat mengidentifikasi homoskedastisitas dengan menggunakan metode *plot dispersi*. Jika grafik tidak menunjukkan pola tertentu, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit, maka model yang baik akan dihasilkan. Uji Glejser, Park, dan White adalah uji statistik yang dapat digunakan, dan uji Spearman dapat digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Jika masing-masing variabel memiliki signifikansi 0,05 maka model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel *independen* dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel *dependent* secara nyata. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* secara signifikan terhadap variabel *dependen*. Dimana jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau variabel *independen* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *dependen* (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

$H : \alpha, \alpha = 0$ semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

$H : \alpha, \alpha \neq 0$ semua variabel independen mempengaruhi variable dependen secara bersama-sama.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau jika probabilitas $F_{hitung} >$ tingkat signifikansi 0,05 maka H_0 diterima,

artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau jika probabilitas $F_{hitung} < \text{tingkat signifikansi } 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3. Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section*. Secara teknis data panel dapat memberikan data yang informatif, mengurangi kolinearitas antar perubahan, serta meningkatkan efisiensi (Tri Basuki, 2021). Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk mengetahui apa pengaruh Upah Minimum (X_1), Pertumbuhan Penduduk (X_2) terhadap Tingkat Pengangguran (Y) dihitung dengan menggunakan rumus persamaan garis regresi data berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Pengangguran

X_1 = Upah Minimum

X_2 = Pertumbuhan Penduduk

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien

i = Jumlah

t = Waktu

e = Error

4. Estimasi Model Regresi Data Panel

Adapun penentu model estimate dalam model regresi yaitu dengan menggunakan data panel yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Tri Basuki, 2021):

- a. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data

time series dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat kecil untuk mengestimasi model dan panel.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. *Model fixed effect* adalah teknik estimasi data panel menggunakan variabel *dummy* untuk mendeteksi perbedaan intersep. *Intercept* antar perusahaan, perbedaan intersep dapat muncul karena perbedaan budaya kerja, manajemen dan perawatan intensif. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi ditetapkan antara perusahaan dan waktu.

c. *Random Effect Model* (REM)

Model ini memperkirakan data panel di mana variabel gangguan mungkin terkait dari waktu ke waktu dan antar individu. Dalam model efek acak, perbedaan intersep diperhitungkan oleh kondisi kesalahan masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model efek acak adalah bahwa heteroskedastisitas dihilangkan. Model ini juga dikenal dengan teknologi GLS (*Generalized Least Square*).

5. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menganalisis data panel, perlu dilakukan pengujian spesifikasi model yang benar untuk mendeskripsikan data mana yang paling baik dan paling cocok, untuk memilih model mana yang paling cocok maka akan dilakukan pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman (Eko Caraka & Yasin, 2017). Adapun uji yang dimaksud yaitu:

a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan *common effect model* atau *fixed effect model*. Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan Uji Chow yaitu:

- 1) Jika Probability > 0.05 , maka yang terpilih adalah CEM (dilanjutkan dengan Uji LM)
- 2) Jika probability < 0.05 , maka yang terpilih adalah FEM (dilanjutkan dengan Uji Hausman).

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan uji chow:

- 1) Jika probability > 0.05 , maka yang terpilih adalah REM (Dilanjutkan dengan Uji LM).
- 2) Jika probability < 0.05 , maka yang terpilih adalah FEM

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan model pendekatan *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi data panel. *Random Effect Model* dikembangkan oleh Breusch-Pagan, pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect Model*. Uji LM didasarkan pada distribusi *Chi-Square* dengan derajat kebebasan sebesar jumlah variabel independent.

Dasar pengambilan keputusan (Damodar & Dawn C Porter, 2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika probability $> 0,05$, maka yang terpilih adalah CEM
- 2) Jika probability $< 0,05$, maka yang terpilih adalah REM

6. Uji Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji statistik t bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung $>$ t tabel) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{Sig} < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika t hitung lebih kecil dari t tabel (t hitung $<$ t tabel) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{Sig} > 0,05$), yang berarti H_0 diterima, maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Menurut (Sahir, 2022), uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung $>$ F tabel) atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{Sig} < 0,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, maka secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel (F hitung $<$ F tabel) atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{Sig} > 0,05$), yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, maka secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu Pertumbuhan Penduduk (X1), Upah Minimum (X2), dan Tenaga Kerja (X3) terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 berbanding 1, semakin dekat koefisien determinasi (R^2) dari suatu persamaan regresi ke 1, maka semakin besar pengaruh semua pengaruh independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan untuk menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin dekat koefisien determinasi atau persamaan regresi ke 0, maka semakin kecil pengaruh ketergantungan terhadap nilai variabel independen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak diantara $98^{\circ}36'$ - $101^{\circ}53'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}54'$ Lintang Utara sampai dengan $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan, dengan daratan $\pm 42.297,30$ Km² dan luas perairan (laut) ± 186.580 Km² dengan panjang garis pantai wilayah daratan ± 375 Km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.378 Km. Perairan laut ini memiliki 375 pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 1.160 Kelurahan/Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah selatan dengan Bengkulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4. 1
Peta Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis

dengan rata-rata suhu udara 25,78°C dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86.67% dengan tekanan udara rata-rata berkisaran 994.69 mb. Pengaruh letak ini, maka menurut ketinggiannya, wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 m sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30.41%), daerah dengan ketinggian 100 -500 m dpl mencapai 643.552 ha (15.21%), antara 500 – 1000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32.07%) antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18.13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116.6 ha (2.67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian diatas 2.500 m dpl.

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km ²)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	6.011.35
2	Kab. Pesisir Selatan	5.749.89
3	Kab. Solok	3.738.00
4	Kab. Sijunjung	3.130.40
5	Kab. Tanah Datar	1.336.10
6	Kab. Padang Pariaman	1.332.51
7	Kab. Agam	1.804.30
8	Kab. Lima Puluh Kota	3.571.14
9	Kab. Pasaman	3.947.63
10	Kab. Solok Selatan	3.346.20
11	Kab. Dharmasraya	2.961.13
12	Kab. Pasaman Barat	3.887.77
13	Kota Padang	693.66
14	Kota Solok	71.29
15	Kota Sawahlunto	231.93
16	Kota Padang Panjang	23.00
17	Kota Bukittinggi	25.24
18	Kota Payakumbuh	85.22
19	Kota Pariaman	66.13
	Sumatera Barat	42.012.89

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2. Tingkat Pengangguran Sumatera Barat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penganggur adalah orang yang menganggur (yang tidak mempunyai pekerjaan). Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi dan merupakan yang paling erat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standart kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2010)

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan dan kestabilan ekonomi suatu negara. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan. Menurut badan pusat statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja pasa suatu waktu tertentu. Tingkat ini mencerminkan seberapa besar bagian dari angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja secara produktif. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja yang tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap penurunan ouput nasional (BPS, 2023)

Sementara itu, Sukirno (2006) menjelaskan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh peroleh pekerjaan yang sesuai. Dalam kerangka ekonomi makro, pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

3. Upah Minimum Sumatera Barat

Upah kerja atau yang biasa di kenal dengan istilah gaji di indonesia adalah blas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu, sedangkan upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Dalam teori ekonomi, upah secara umum merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya atau tenaga kerja yang diberikan imbalan atas jasanya. (Rizal,2018) Upah merupakan komponen penting dalam hubungan industrial, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh tenaga kerja. Upah juga merupakan sumber utama penghasilan bagi mayoritas rumah tangga dan sangat menentukan tingkat kesejahteraan sosial serta konsumsi masyarakat (Suhartini, 2020).

Menurut pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Defenisi tersebut mengaskan bahwa upah minimum bukan hanya ditetapkan oleh negara, melainkan juga menjadi hak pekerja yang tidak bisa ditawar atau dikurangi melalui kesepakatan yang bertentangan.

Upah merupakan komponen terpenting dalam hubungan industrial, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh tenaga kerja. Upah juga merupakan sumber utama penghasilan bagi mayoritas rumah tangga dan sangat menentukan tingkat kesejahteraan sosial serta ketenagakerjaan formal.

4. Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dan sebuah populasi. Dalam pertumbuhan penduduk secara umum ada 3 varibael

demografi yang sering dikaji yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau pergerakan penduduk. Kelahiran dan kematian merupakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor bukan alami, dalam migrasi terbagi atas dua yaitu migrasi merupakan penambahan jumlah penduduk sedangkan emigrasi adalah pengurangan penduduk atau disebut dengan penduduk atau disebut dengan penduduk yang keluar dalam suatu wilayah. (Andri Devita, Aman Delis, Junaidi 2014)

Pada awalnya manusia berpindah pindah tempat secara tidak sadar, tidak hanya mengikuti dorongan naluri saja, kemudian perpindahan manusia dilakukan dengan kesadaran. Ada dua dorongan naluri saja, kemudian perpindahan manusia dilakukan dengan kesadaran. Ada dua dorongan yang membuat orang bermigrasi yaitu adanya daya tarik dari tempat lain dan tidak adanya daya tarik dari tempat lain dan tidak adanya daya tarik dari yang dihuni. Dalam demografi dikenal istilah penambahan penduduk alami dan penambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, sedangkan penambahan penduduk total. Pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, sedangkan penambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan emigrasi. (Iqbal, 2017)

B. Analisis Data Panel

1. Analisis Regresi Data Panel

Data time series adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu. Data Cross section adalah data yang terdiri dari beberapa atau banyak objek dalam periode waktu, jadi data panel adalah data yang diperoleh dari data cross section yang diobservasi berulang pada unit individu (objek) yang sama pada waktu yang berbeda. (Bambang Juanda, 2021). Regresi data panel memiliki tiga macam pendekatan dalam memilih estimasi Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model.

a. Common Effect Model

Pendekatan model yang hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Metode ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari pengolahan Common Effect Model sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Common Effect Model

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Signifikan
C	2.911925	2.018999	0.0472
Upah Minimum	3.561280	3.563920	0.0006
Pertumbuhan Penduduk	-1.752043	-3.206129	0.0020
N	76	76	76
R-Squared	0.219648		
Adjusted R-squared	0.198268		
F-Statistik	10.27374		
Signifikan (F-Statistik)	0.000117		

Sumber : hasil output E-Views 12, data di olah

Berdasarkan hasil regresi dengan Common Effect Model (CEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 2.911925 dengan probability 0.0472, persamaan regresi pada nilai R-squared sebesar 0.219648 menjelaskan bahwa variabel tingkat pengangguran dipengaruhi oleh upah minimum dan pertumbuhan penduduk sebesar 21% dan sisanya 79% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

b. Fixed Effect Model

Model Fixed Effect adalah model yang digunakan dengan mempertimbangkan bahwa perubah-perubah yang dihilangkan dapat mengakibatkan perubahan dalam intersep-intersep cross section dan time series. Perubah dummy dapat ditambahkan ke dalam model untuk memungkinkan perubahan intersep (Firdaus, 2018, p. 226). Hasil pengolahan menggunakan Fixed Effect Model sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Signifikan
C	6.353534	5.937268	0.0000
Upah minimum	-16.33864	-0.216381	0.8295
Pertumbuhan penduduk	-0.669204	-1.577621	0.1204
N	76	76	76
R-Squared	0.904825		
Adjusted R-squared	0.870215		
F-Statistik	26.14399		
Signifikan (F-Statistik)	0.000000		

Sumber : hasil output E-Views 12, data diolah

Berdasarkan hasil regresi dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 6.353534 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Persamaan regresi pada nilai R-squared sebesar 0.904825 menjelaskan bahwa variabel tingkat pengangguran dipengaruhi upah minimum dan pertumbuhan penduduk sebesar 90% dan sisanya 10% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

c. Random Effect Model

Random Effect Model adalah model regresi data panel yang memiliki perbedaan dengan Fixed Effect Model, Metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Random Effect Model dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan sehingga estimasinya dapat lebih efisien. Random Effect Model menggunakan pendekatan Generalized Least Square sebagai pendugaan parameter

Tabel 4. 4
Random Effect Model

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Signifikan
C	5.876247	5.429848	0.0000
Upah minimum	37.16887	0.519363	0.6051
Pertumbuhan penduduk	-0.837470	-2.091128	0.0400
N	76	76	76
R-Squared	0.054552		
Adjusted R-squared	0.028650		
F-Statistik	2.106054		
Signifikan (F-Statistik)	0.129053		

Sumber : hasil output E-views 12, data diolah

Berdasarkan hasil regresi dengan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 5.876247 dengan probabilitas sebesar 0.0000, persamaan regresi pada nilai R-squared sangat kecil sebesar 0.054552, menjelaskan bahwa variabel tingkat pengangguran dipengaruhi upah minimum dan pertumbuhan penduduk sebesar 5% dan sisanya 95% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

2. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih model mana yang lebih baik antara Common Effect dengan Fixed Effect

Hipotesis pada uji chow adalah sebagai berikut:

Ho : Common Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Kriteria :

Jika nilai sig > 0.05 maka Ho diterima

Jika nilai sig < 0.05 maka Ha diterima

Tabel 4. 5
Hasil Uji Chow

Effects Test	Signifikan
Cross-section F	0.0000
Cross-section Chi-square	0.0000

Sumber : hasil output e-views 12, data diolah

Berdasarkan uji chow ditunjukkan pada tabel 4.5 diatas diperoleh nilai signifikansi dari Cross-section chi-square $0.0000 < 0.05$ dan Cross-section f sebesar $0.0000 < 0.05$, sehingga secara statistik H0 ditolak dan Ha diterima, maka model estimasi yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Dari hasil uji chow didapatkan hasil model Fixed Effect Model, maka perlu dilakukan uji hausman untuk menguji model yang lebih tepat digunakan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model.

b. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara Random Effect Model dengan Fixed Effect Model.

Hipotesis pada uji hausman sebagai berikut:

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Kriteria

Jika nilai sig > 0.05 maka Ho diterima

Jika nilai sig < 0.05 maka Ha diterima

Tabel 4. 6
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Signifikan
Cross-section random	0.0624

Sumber: hasil output e-views 12, data diolah

Berdasarkan hasil uji hausman yang ditunjukkan pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi dari Cross-section random sebesar $0.0624 > 0.05$ sehingga secara statistik H0 diterima dan Ha ditolak, maka model estimasi yang terpilih adalah Random Effect Model.

c. Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui mana yang lebih baik antara Random Effect Model dan Common Effect Model.

Hipotesis pada uji Lagrange Multiplier sebgai berikut:

Ho : Common Effect Model

Ha : Random Effect Model

Kriteria :

Jika nilai sig > 0.05 maka Ho diterima

Jika nilai sig < 0.05 maka Ha diterima

Tabel 4. 7
Hasil Uji Langerange Multiplier

	Signifikan
Breusch-Pagan	65.10567
	0.0000

Sumber: hasil uji e-views 12, data diolah

Berdasarkan Uji Lagrange Multiplier yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai signifikansi dari cross-section Common sebesar $0.0000 < 0.05$ sehingga secara statistik H_a diterima dan H_0 ditolak, maka model estimasi yang digunakan pada regresi data panel adalah Random Effect Model.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati & Porter (2015), model panel pengaruh gabungan (*Common Effect*) dan model panel pengaruh tetap (*fixed effect*) menggunakan *Ordiner least square* (OLS), sedangkan metode estimasi model panel pengaruh acak (*random effect*) menggunakan metode *generalized least square* (GLS). Pada model estimasi GLS, tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, karena persamaannya telah memenuhi asumsi klasik. Sebaliknya, pada model estimasi OLS, perlu dilakukan uji asumsi klasik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian pemilihan metode estimasi yang terpilih adalah *random effect* (GLS), maka dari tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2015)

4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Setelah melakukan pengujian seperti uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier didapatkan hasil untuk model regresi data panel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Hasil regresi menggunakan *Random Effect Model* sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Random Effect Model

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Signifikan
C	5.876247	5.429848	0.0000
Upah minimum	37.16887	0.519363	0.6051
Pertumbuhan penduduk	-0.837470	-2.091128	0.0400
N	76	76	76
R-Squared	0.054552		
Adjusted R-squared	0.028650		
F-Statistik	2.106054		
Signifikan (F-Statistik)	0.129053		

Sumber : hasil output e-views 12, data diolah

Berdasarkan hasil regresi random effect model pada tabel didapatkan hasil persamaan model regresi antara variabel dependen (tingkat pengangguran) dengan variabel independen (upah minimum dan pertumbuhan penduduk) sebagai berikut:

$$Y = 5.8762468063 + 37.1688727391 * X1 - 0.837469536645 * X2$$

- Nilai konstanta sebesar 5.87, maka dapat diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan maka variabel dependen akan mengalami kenaikan sebesar 5.87.
- Nilai koefisien regresi variabel bernilai positif sebesar 37.16, maka bisa diartikan jika variabel x1 mengalami kenaikan maka variabel y akan mengalami kenaikan sebesar 37.16.
- Nilai koefisien regresi variabel bernilai negative sebesar 0.83, maka bisa diartikan bahwa jika variabel x2 mengalami penurunan maka variabel y akan mengalami penurunan sebesar 0.83, dan jika variabel x2 mengalami kenaikan maka variabel akan mengalami kenaikan sebesar 0.83.

5. Pengujian Hipotesis

- Uji Koefisien Determinan

Uji R-squared dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat

dilihat R-squared sebesar 0.05. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa variabel dependen yaitu tingkat pengangguran secara bersama sama dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu upah minimum dan pertumbuhan penduduk sebesar 5% dan 95% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

b. Uji Parsial

Uji t adalah sebuah uji statistik yang dilakukan untuk menguji variabel independen terdapat pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengujian uji t sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran Sumatera Barat tidak dipengaruhi oleh variabel upah minimum dan pertumbuhan penduduk .
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka secara parsial hipotesis H_a diterima dan menolak H_0 , menunjukkan bahwa seluruh variabel independent upah minimum dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh terhadap Tingkat pengangguran Sumatera Barat.
- 3) Jika nilai probabilitas signifikan > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan < 0.05 , maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Cara untuk menentukan apakah variabel parsial upah minimum (x_1) dan pertumbuhan penduduk (x_2) memiliki dampak atau tidaknya kepada Tingkat pengangguran perlu dilakukannya uji regresi secara parsial (uji t).

Tabel 4. 9
Hasil Uji Parsial

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Signifikan
C	5.876247	5.429848	0.0000
Upah Minimum	37.16887	0.519363	0.6051
Pertumbuhan Penduduk	-0.837470	-2.091128	0.0400

Sumber : data output e-views, data diolah

Untuk dapat menentukan apakah variabel parsial Upah minimum dan pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap tingkat pengangguran, digunakan uji regresi secara parsial (uji t). Sebelum melihat uji hipotesis ditolak atau diterima, t tabel ditentukan menjadi 1.66600 dengan tingkat signifikan $\alpha = 0.05$ (5%) menggunakan sumbu tunggal dan $df = n-k-1$ atau $d = 76-2-1 = 73$. Hasil uji analisis dilihat dari penjelasan berikut:

1) Upah minimum terhadap tingkat pengangguran

Dalam penelitian ini apakah upah minimum berpengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, variabel upah minimum (x_1) memiliki nilai signifikan sebesar 0.6051 lebih besar dari $\alpha = 0.05$ (5%), selain nilai signifikan, dari tabel juga diketahui bahwa t hitung variabel upah minimum (x_1) sebesar 0.519363 lebih kecil dari t tabel 1.66600, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan bahwa adanya tidak pengaruh antara upah minimum dengan tingkat pengangguran.

2) Pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran

Dalam penelitian ini apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, variabel pertumbuhan penduduk (x_2) memiliki nilai signifikan sebesar 0.0400 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ (5%), selain nilai signifikan, dari tabel juga diketahui bahwa t hitung variabel pertumbuhan penduduk (x_2) sebesar -2.091128 lebih besar dari t tabel 1.66600, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa adanya pengaruh

antara pertumbuhan penduduk dengan Tingkat pengangguran.

3) Uji Simultan

Uji F adalah uji yang dilakukan secara bersama sama yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum (x1) dan pertumbuhan penduduk (x2) terhadap tingkat pengangguran Sumatera Barat (Y) secara bersama sama dengan menggunakan analisis yaitunya uji F (F-statistik). Dengan kriteria pengujian:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (k-1-n-k) maka diterima hipotesis alternatif (H_a) artinya secara statistik dapat dibuktikan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ (k-1-n-k) maka menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_a), artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- c) Jika Probabilitas (sig) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan Probabilitas (sig) $< \alpha$ (0,05) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya adanya pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Simultan

F-Statistik	2.106054
Prob (F-Statistik)	0.129053

Sumber: data output e-views, data diolah

Untuk dapat menentukan apakah variabel independen upah minimum dan pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap tingkat pengangguran, digunakan uji regresi secara simultan (uji f). Sebelum melihat uji hipotesis ditolak atau diterima, f tabel ditentukan menjadi 3.12 dengan tingkat signifikan $\alpha = 0.05$ (5%) menggunakan sumbu tunggal dan $df = k (n-1)$.

Berdasarkan hasil uji untuk F hitung sebesar 2.106054 dan di dapatkan f tabel sebesar 3.12. $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2.106054 < 3.12$) dengan signifikan yang di peroleh 0.129053 atau besar dari 0.05 ($0.129053 > 0.05$), maka ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa upah minimum (x_1) dan pertumbuhan penduduk (x_2) secara bersama sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran (Y) Sumatera Barat.

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini adalah pengujian dari pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran Sumatera Barat. Setelah dilakukannya pengujian pemilihan model estimasi regresi data panel, persamaan regresi, uji koefisien determinan dan uji hipotesis maka akan dipahami lebih dalam mengenai pengaruh masing-masing variabel. Dari hasil uji R-squared bahwa variabel dependen yaitu tingkat pengangguran secara simultan dijelaskan oleh variabel independen yaitu upah minimum dan pertumbuhan penduduk sebesar 5% sedangkan sisanya 95% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Hal ini terjadi karena di dalam penelitian ini variabel upah minimum dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran.

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat pengangguran di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, bahwa signifikan variabel independen upah minimum maka secara parsial upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Sumatera Barat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh upah minimum (x_1) terhadap tingkat pengangguran (y) adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai t-hitung (0.519363) < dari t-tabel (1.66600) yang nilai signifikan 0.6051 lebih besar dari 0.05, maka hasilnya berarti H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel upah minimum dengan tingkat pengangguran di

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Menurut Malthus, menyatakan sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economies*). Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja dengan sumber utama penawaran tenaga kerjanya adalah penduduk usia kerja, namun dalam penelitian ini upah minimum tidak berpengaruh. Hal ini diduga bahwa seseorang yang memiliki tenaga kerja namun dengan upah yang kecil itu tidak akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Hal itu dikarenakan upah yang baik akan mengurangi tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2023) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat Periode 2017 – 2021”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak memengaruhi jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021, hal ini terlihat dari besarnya nilai uji t 0.083 yang melebihi nilai signifikansi 5%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2021) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum Kabupaten serta Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara”, hasil penelitian ini menunjukkan upah minimum kabupaten secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliya (2022) dengan judul “Pengaruh Covid-19 dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia: Analisis Data Panel 33 Provinsi tahun 2010-2021”, dengan hasil yang menunjukkan bahwa upah minimum Provinsi (UMP) rill tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochim (2016), dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2008-2014”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Jawa Barat.

2. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, bahwa signifikan variabel independen upah minimum maka secara parsial pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Sumatera Barat. Dengan kata lain pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat dengan nilai t-hitung (-2.091128) < dari t-tabel (1.66600) yang nilai signifikan 0.0400 lebih kecil dari 0.05, maka hasilnya berarti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan antara variabel pertumbuhan penduduk dengan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Sumatera Barat. Dengan kata lain, variabel pertumbuhan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Menurut Adam Smith, mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi, penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian, pertumbuhan penduduk dan pembangian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, namun dalam penelitian ini pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hal ini bisa terjadi diakibatkan pertumbuhan penduduk yang cepat akan membuat banyaknya tenaga kerja

yang didapatkan namun jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan upah yang baik itu akan dapat memperbanyak angka pengangguran dan mengakibatkan meningkatkan pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2023), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat”, dari hasil menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2023), dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di beberapa Negara Asean”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2021), dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara”, dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan jangka panjang.

3. Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat

Berdasarkan uji simultan (uji f), f hitung (2.106054) < f tabel (3.12) dengan signifikan (0.129053) > 0.05 , yang menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti upah minimum dan pertumbuhan penduduk secara Bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2024), dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Jawa Barat”, dengan hasil yang menunjukkan bahwa secara simultan didapatkan F hitung sebesar 831.78 dan nilai signifikan < 0.05 , sehingga artinya

secara simultan jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi pengangguran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah minimum yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat dapat dijelaskan secara teoritis pandangan ekonomi klasik berasumsi bahwa kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya tenaga kerja sehingga mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja namun, pengaruh tersebut tidak selalu terjadi karena adanya faktor struktural dan dinamis di pasar tenaga kerja, seperti melalui perbaikan manajemen, modernisasi teknologi atau pengaturan ulang proses produksi sehingga kenaikan upah tidak selalu di iringi dengan pengurangan tenaga kerja.

Sedangkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat,” dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengangguran dan secara simultan didapatkan F hitung sebesar $2.106054 < 3.12$ dengan signifikan yang diperoleh $0.129053 > 0.05$ maka ini menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti bahwa upah minimum (x_1) dan pertumbuhan penduduk (x_2) secara bersama sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat pengangguran (Y) Sumatera Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Uji Parsial (Uji -T) yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel Upah Minimum menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan oleh t hitung 0.519363 lebih kecil dari t tabel 1.66600 ($-0.519363 < 1.66600$). Selain itu tingkat signifikansi untuk upah minimum adalah 0.6051 yaitu lebih besar dari 0.05.
2. Berdasarkan Uji Parsial (Uji - T) yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Penduduk menunjukkan bahwa adanya tidak pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan bahwa t hitung -2.091128 lebih kecil dari 1.66600 ($-2.091128 < 1.66600$). Selain itu tingkat signifikansi untuk pertumbuhan penduduk adalah 0.0400 yaitu kecil dari 0.05.
3. Berdasarkan Uji Simultan (Uji F) yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa secara bersama sama variabel independen Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Tingkat Penganggran. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 2.106054 lebih kecil dari f tabel sebesar 3.12 ($2.106054 < 3.12$) dan tingkat signifikansi 0.129053 lebih besar dari 0.05 ($0.129053 > 0.05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum dan pertumbuhan penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran.

B. Implementasi

Secara umum upah minimum di Sumatera Barat belum sepenuhnya merata dan efektif, terutama di luar wilayah perkotaan. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait serta rendahnya tingkat pemahaman pekerja terhadap hak-haknya menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi UMP secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam memastikan pelaksanaan kebijakan upah minimum berjalan adil dan merata. Disamping itu, peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja juga menjadi hal penting agar pengusaha mampu memberikan upah sesuai ketentuan tanpa mengorbankan efisiensi usaha.

Pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, terutama dalam aspek ketenagakerjaan. Peningkatan jumlah penduduk justru menimbulkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka di beberapa wilayah. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menyebabkan munculnya ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk belum dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan. Pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai program seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan tidak hanya berfokus pada kebijakan upah minimum dan pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasional, pendidikan kejuruan, dan program peningkatan keterampilan yang sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya terserap ke dalam pasar kerja, tetapi juga mampu bersaing secara produktif.

2. Diharapkan pemerintah di Provinsi Sumatera Barat kebijakan pengupahan perlu dievaluasi untuk memastikan apakah struktur UMP saat ini benar-benar mendorong penyerapan tenaga kerja, atau justru hanya berdampak pada sektor formal saja. Pemerintah dapat mendorong model insentif lain, seperti pajak rendah bagi UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, investasi daerah, pertumbuhan sektor industri, indeks pembangunan manusia (IPM), atau produktivitas tenaga kerja, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ainul Ghazali, & Tony Seno Aji. (2024). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran*. Jurnal Ekonomi 4(2).
- Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto . (2016). *Analisis Regresi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Fauzi. (2020). *Dampak Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis.
- Andri Devita, Arman Delis, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurna Prepektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, Vol. 2, No. 2, 65*.
- Annisa, Sharuddin. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Beberapa Negara ASEAN. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi (JAIE). Vol.2,2023*.
- Arfida. (2007). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Auliya Loura, Agusalim Lestari.(2022). Pengaruh Covid-19 dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia Analisis Dta Pnel 33 Provindi tahun 2010-2021. *Jurnal Ketenagakerjaan, Vol, 17 No. 3*.
- Bambang Juanda, Junaidi. (2021). *Ekonometrika Deret Waktu Teori & Aplikasi*. Bogor : IPB Press
- Dharmakusuma, S. (2018). *Trade Off Antara Inflasi dan Tingkat Pengangguran*. Jakarta: Gema Stikubank.
- Diana, L. A. (2020). Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lamoung Dalam Prespektif Ekonomi Islam Periode 2013-2019. *Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 14*.
- Eko Caraka, R., & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*. WADE Group.
- Firdaus M. (2018). *Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel dan Time Series*. Bogor: IPB Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali. A.A., (2024). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Barat*. Jurnal Of Economic Page 72-84
- Gita Manalu. (2025). *Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi, Akutansi, dan Manajeme/n, 4(1).
- Gujarati, Damodar N.(2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika = Basic Econometrics*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hanifa. (2024). *Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Sumatera Barat*. UIN Imam Bonjol, Padang.
- HM, M. (2015). Potret Ketenagakerjaan Pengangguran, Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Al-Buhuts, vol. 11, No. 1, 46*.
- HM, M. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan Indonesia: Masalah Dan Solusi. *Jurnal Al-Buhuts, Vol. 11, No. 1, 61*.
- Hutasoit, I. (2017). Pengantar Ilmu Kependudukan. In *Alfabeta* (p.194). <http://eprints.ipdn.ac.id/5508/21/buku>
- Iqbal, M. (2017). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemerintahan Daerah . *JOM Fekom, Vol 4, No. 1, 886-887*.
- Izzaty, & Rafika Sari. (2022). *Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. 4(2)
- Jhingan, M. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Jhingan, M. (2016). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lincolin, A. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Lindiarta, A. (2018). *Analisis Pengaruh Tingkat Upah, Inflasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kota Malang*. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

- Lucky Radita Alma, S.KM., M.P., CENDEKIA Jaya, P.J., & Harjanto, T. (2019). Penulis: Lucky Raditia Alma, S.KM., M.PH. In *CENDEKIA Jaya* 3(1).
- Mankiw. (2010). *Pengantar Ekonomi Makro Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, Gregory, N. (2010). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Mankiw, Gregory, N. (2021). *Makro Ekonomi Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum*. Worth Publisher.
- Manullang Adreas Trison, Septina Kusumaningtyas, & Citoro Ompu Momon, M. (2024). *Studi Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Inflasi dan Tingkat Pengangguran*. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. 1(4).
- Michael P. Todaro & Smith, S. C. (2011) . *Economic Developmen*.
- Mulyaningsih. (2019). *Pembangunan Ekonomi*. CV KIMFA MANDIRI,
- Nafan. (2014). *Ekonomi makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Norholes, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Povinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, VOL.12 NO.1* , 12.
- Priyono, & Ismail Zainuddin. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu.
- Purba, Armando adyanto. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Tingka Penggguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7 n0.3, 2021*.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Ridwan, M. (2013). Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, VOL. 1, NO. 2*, 253.
- Ritongga. (2003). *Ekonomi SMA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rochim Muhammad. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/ Kota Jawa Barat Tahun 2008 – 2-14. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol.4 No.2, Juli 2016*.
- Rumbia, W. A. (2008). Proyeksi Penduduk Berlipat Ganda Di Kota Bau-Bau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu, Vol. 2, No. 1*, 2-3.
- Risen, Sambaulu, A. (2022). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Pengangguran*. *Jurnal Berkala Ilmiah dan Efisiensi*, 22(6)
- Safuridar. (2017.). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudera Ekonomatika, VOL 1, No. 1*, 95.
- Sahara, Windy Alifah. (2023). Pengaruh Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, Vol.9 No.1*
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Equilibrium, Vol.3, No. 2*, 381-390.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- sofyardi. (1999). *dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi*. padang: pusat studi ekonomi koperasi fakultas ekonomi universitas bung hatta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, E., Yumarni, A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. Rajawali Pers.

- Sujarweni, W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar (Edisi ketiga)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Modern Perkembangan Pemikiran Dan Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Tiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutrisno, E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Syam, S. (2013). *Pengaruh Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makasar*. Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM INDONESIA.
- Suharnanik. (2023). *Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran*. UWKS PRESS.
- Suhartini, E., Yumarni, A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*. Kencana.
- Suwito. (2020). *Pengantar Demografi*. Ediiide Infografika.
- Tjondronegoro, S. M. (1984). *Ilmu Kependudukan*. Jakarta: Erlangga Soft Cover. 4.
- Tri Basuki, A. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan EVIEWS)*. ISBN
- Triningsih, A. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan : Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*. Rajawali Pers.

- Wijaya Rendi, Gani Irwan. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten serta Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, Vol. 6 No.2
- Wulandari, R. (2019). *Masalah Pengangguran Di Indonesia : Analisis Penyebab dan Dampak*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 17(1).
- Wulandari. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Urbanisasi di Sumatera Barat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan 6(1)